

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Umumnya perusahaan merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan kondisi perekonomian yang sedang berjalan. Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan akan ditandai dengan kemampuan perusahaan itu untuk mendapatkan laba. Besar kecilnya laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau badan merupakan petunjuk bagi pihak luar untuk menilai prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan. Tujuan pembangunan nasional yang terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah pembangunan dibidang ekonomi yang mencakup berbagai sektor.

Di Indonesia terdapat 3 pelaku perekonomian nasional, yaitu swasta, pemerintah dan koperasi. Koperasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sama dengan badan-badan usaha lain di dalam pembangunan, khususnya di sektor ekonomi. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi adalah salah satu badan usaha yang cukup berkembang di Indonesia dan

merupakan bentuk perusahaan yang paling sesuai dengan demokrasi ekonomi Indonesia seperti yang terkandung dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama.

Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggung jawaban yang baik dan relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya dalam penyajian laporan keuangannya.

Laporan keuangan adalah tolok ukur dalam menilai kesehatan perusahaan. Tujuan laporan keuangan menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013) adalah menyediakan informasi laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi menjadi tiga yaitu manajemen, pemegang saham, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal merupakan kreditur dan pemerintah. Melihat pentingnya laporan keuangan dalam menilai kesehatan usaha maka laporan keuangan harus disusun secara cermat dan terbebas dari bias. Laporan keuangan harus dapat diinterpretasikan oleh para pihak yang memiliki kepentingan dengan persepsi

yang sama. Untuk itu perlu adanya suatu pernyataan standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan suatu badan usaha atau koperasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai laporan keuangan sangat penting, sebab salah pengertian terhadap laporan keuangan akan menghasilkan keputusan yang salah serta dapat membawa koperasi menuju kebangkrutan.

Dalam laporan keuangan tercatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya. Dalam menyajikan laporan keuangan, akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan dan ketidaktepatan. Untuk meminimumkan bahaya ini, profesi akuntansi mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang disebut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Dari hal tersebut, maka kita membutuhkan standarisasi akuntansi yang berlaku secara global guna mempermudah para pengguna laporan keuangan dalam membaca, memahami, dan menganalisis laporan keuangan dan untuk menginformasikan laporan keuangan berupa posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan. Dalam penyajian laporan keuangan koperasi harus menganut SAK-ETAP yang diputuskan berdasarkan peraturan menteri yang baru Nomor 12/PER/M.KUKM/IX/2015. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, koperasi yang wajib menggunakan SAK-ETAP. Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) sebagai solusi bagi

perusahaan menengah dan kecil yang sering menemukan kesulitan dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang selama ini berlaku. Perusahaan kecil dan menengah dapat memilih untuk menggunakan standar akuntansi yang akan mereka gunakan selama memenuhi syarat sebagai entitas yang diperbolehkan menggunakan SAK- ETAP dan dijalankan secara konsisten. Selain perusahaan kecil dan menengah, ada beberapa perusahaan lain yang menggunakan SAK-ETAP sebagai standar akuntansinya berdasarkan peraturan pemerintah bersama IAI. Salah satu entitas tersebut ialah koperasi.

Kehadiran SAK-ETAP diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menyajikan laporan keuangan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. Tujuan dari SAK-ETAP sendiri yakni untuk memberikan kemudahan bagi entitas skala kecil dan menengah. SAK-ETAP sendiri dibuat untuk mengatasi segala keluhan penerapan PSAK umum pada entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK-ETAP bertujuan untuk mengakomodir segala kebutuhan entitas tanpa akuntabilitas public dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya entitas tanpa akuntabilitas public menerapkan SAK-ETAP dalam menyajikan laporan keuangannya.

Saat ini, meskipun pemerintah telah memberikan pedoman bagaimana cara pembuatan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 untuk koperasi tetapi, pada kenyataannya masih banyak koperasi yang pelaporannya belum memadai karena sebagian besar penyajian laporan keuangannya dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan SAK-ETAP. Pelaporan keuangan koperasi sebaiknya disajikan

berdasarkan SAK-ETAP. Dalam pelaksanaan penyajian laporan keuangan yang dilakukan selama ini oleh Koperasi PT. Pusri belum sepenuhnya sesuai dengan SAK-ETAP.

Bentuk penyajian laporan keuangannya yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam perhitungan laba rugi terdapat salah satu komponen yakni imbalan kerja, Koperasi PT. Pusri belum melaksanakan pencadangan atas imbalan kerja menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam SAK ETAP.

Penelitian Juliana Tambunan (2014), menunjukkan bahwa Koperasi Karyawan Jujur Makmur belum menerapkan standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik secara penuh sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan Koperasi Karyawan Jujur Makmur belum menyajikan laporan keuangan secara penuh.

Penelitian Achmad Bayu Hardiansyah (2015), menunjukkan bahwa Koperasi Serba Usaha Pionir Desa Meranjat juga belum memiliki sistem akuntansi utama yang benar seperti formulir, jurnal, buku besar, dan kode akun sehingga dengan kondisi yang seperti itu Koperasi Serba Usaha Pionir Desa Meranjat akan sulit untuk dapat menghasilkan laporan keuangan secara wajar dan tepat berdasarkan SAK-ETAP.

Penelitian Siti Supinah (2015), menunjukkan bahwa pihak koperasi serba usaha Aspada belum melakukan penerapan standar akuntabilitas entitas publik

(SAK-ETAP) secara penuh sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan koperasi serba usaha Aspada.

Penelitian Feri Indawatika (2017), menjelaskan bahwa Koperasi Intako membuat 3 jenis laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi serta catatan atas laporan keuangan sebagai laporan yang mempresentasikan kinerja operasional perusahaan. Dalam proses penyusunan dan penyajian neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan yang dilakukan Koperasi Intako sudah sesuai dengan SAK-ETAP tetapi, ada beberapa perbedaan nama pos dan mempunyai arti yang sama. Namun, Koperasi Intako tidak menyusun dan menyajikan laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, hal ini dikarenakan terlalu rumit dan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian memberi kelonggaran kepada koperasi yaitu penyusunan laporan keuangan sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.

Penelitian Elsa Meandaspa (2018), menjelaskan bahwa penyajian laporan yang disajikan oleh koperasi Dharma Karya Palembang pada dasarnya telah sesuai dengan SAK-ETAP. Hanya saja pada laporan keuangan koperasi Dharma Karya Palembang tidak dicantumkan secara detail pos-pos yang sudah ditentukan dalam SAK-ETAP. Hal ini menjadi kelemahan pada laporan keuangan yang dibuat oleh pihak koperasi Dharma Karya Palembang.

Koperasi PT. Pusri merupakan koperasi perkumpulan istri pegawai PT. Pusri, Koperasi Wanita Keluarga Pusri termasuk ke dalam Koperasi perkumpulan para istri pegawai yang bekerja di PT. Pusri yang bentuk koperasinya sekunder

bergerak dibidang simpan pinjam, cafetaria, dan usaha lain-lain. Dimana pendanaannya berasal dari modal sendiri dan modal luar, modal sendiri terdiri dari simpanan sukarela, simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan modal. Sedangkan modal luar terdiri dari pokok pinjaman pihak ketiga. Adanya koperasi dapat menunjang ekonomi anggota mendapatkan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, makapenulistertarik untuk mengambil judul penelitian tentang : **“Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP Pada Koperasi PT. Pusri.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyajian laporan keuangan pada Koperasi PT. Pusri berdasarkan SAK-ETAP ?

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Agar permasalahan ini lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penulisan ini, penulis hanya akan membahas tentang penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAK-ETAP pada Koperasi PT. Pusri.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi PT. Pusri berdasarkan SAK-ETAP.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dan sebagai bahan informasi atau referensi agar dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan sehingga berguna bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Institusi

Bagi Koperasi PT. Pusri dalam hal ini adalah dapat memberikan masukan bagi koperasi dalam pelaporan keuangannya, sehingga koperasi dapat melaporkan hasil usahanya secara tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai penyajian laporan keuangan koperasi sesuai dengan SAK-ETAP pada perusahaan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.